

DIY ALOKASIKAN RP 42 MILIAR

## Ketersediaan Beras Program MBG Surplus

YOGYA (KR) - Pemda DIY mengalokasikan anggaran sebesar Rp 42 miliar untuk mendukung program nasional pemberian makan bergizi gratis (MBG). Dana tersebut menjadi bagian dari kontribusi DIY terhadap program prioritas pemerintah pusat yang tertuang dalam dokumen perencanaan RPJMN dan program percepatan. Perlu diketahui kontribusi daerah itu telah tertantum dalam pedoman penyusunan APBD 2025.

"Dalam pedoman itu daerah diminta ikut berkontribusi berdasarkan kemampuan keuangan masing-masing. Untuk DIY, kontribusi dihitung sebesar 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alokasi anggaran sebesar Rp 42 miliar itu telah diposisikan dalam beberapa pos, termasuk di Disdikpora DIY.

Meski begitu juklak dan juknis pelaksanaan masih menunggu dari pusat. Secara teknis, masih ditangani pusat melalui Badan Gizi Nasional. "Daerah hanya menyiapkan anggaran dan memetakan potensi lokal," kata Kepala Bappeda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti MT, Senin (6/1).

Made mengungkapkan, untuk mendukung program MBG, Bappeda DIY telah mengidentifikasi potensi sektor

pertanian dan perikanan. Pihaknya memastikan, DIY memiliki surplus produksi padi (beras) yang mencapai 546 ribu ton pertahun, jauh melebihi kebutuhan program yang diperkirakan sekitar 10,6 ribu ton pertahun.

Kendati demikian untuk penyediaan sayur belum sepenuhnya bisa dipenuhi sendiri. Karena sebagian masih mengambil dari Jawa Tengah dan sejumlah daerah di sekitarnya. Walaupun begitu aksesibilitas dan distribusi bahan pangan di DIY sangat mudah karena adanya pasar tradisional yang tersebar luas.

"Potensi perikanan dan produk pertanian lainnya juga telah kami petakan untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung logistik program MBG. Kesiapan DIY tidak ha-

nya dalam distribusi logistik, tetapi juga dalam mendukung ketahanan pangan lokal," ungkapnya.

Made menambahkan, meski alokasi anggaran sudah tersedia, Pemda DIY belum menerima informasi detail terkait implementasi di lapangan. Karena pemerintah pusat masih memimpin pelaksanaan program di beberapa daerah, termasuk DIY. Dengan anggaran yang sudah disiapkan dan koordinasi yang terus dilakukan, Pemda DIY optimistis program makan bergizi gratis ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Koordinator Substansi Bagian Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji mengungkapkan, program MBG untuk satuan pendidikan yang digulirkan pemerintah pusat segera dilaksanakan di DIY. Pelaksanaan program ini sepenuhnya ditangani Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan institusi TNI di setiap kabupaten/kota, yaitu Kodim dan Koramil.

(Ria)-d

## PENYIDIK PERIKSA WAHYU SETIAWAN KPK Jadwal Ulang Periksa Hasto

JAKARTA (KR) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi untuk tersangka Hasto Kristiyanto (HK). Sementara pemeriksaan terhadap HK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangannya (obstruction of justice) perkara Harun Masiku, penyidik KPK menjadwalkan ulang.

"Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (6/1).

Awalnya, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto pada hari Senin ini (6/1) pukul 10.00 WIB. Namun yang bersangkutan mengirimkan surat kepada penyidik KPK mengenai alasan ketidakhadirannya. "Informasi dari penyidik bahwa saudara HK mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan," jelas Tessa. (Ful)-d

## Komisi Kejaksaan Terima 869 Laporan Pengaduan

JAKARTA (KR) - Komisi Kejaksaan menerima 869 laporan pengaduan masyarakat (Lapdumas) dari seluruh Indonesia sepanjang tahun 2024. Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Babul Khoir Harahap di Gedung Komisi Kejaksaan, Jakarta, Senin (6/1) mengatakan, provinsi terbanyak yang mengajukan laporan adalah Jakarta.

"Jakarta ini selalu yang terbanyak karena perkara Jakarta juga paling banyak. Jakarta itu satu Kejari saja 300-400 perkara, bahkan kewalahan juga bagi mereka untuk menanganinya,"

ucapnya.

Kedua terbanyak adalah Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara di peringkat ketiga, Jawa Barat di peringkat keempat, dan Sumatera Selatan di peringkat kelima.

Adapun jumlah tersebut, kata Babul Khoir, lebih sedikit jika dibandingkan dengan data tahun lalu. "Tahun lalu itu hampir 1.000 laporan dari masyarakat. Akan tetapi, sekarang cuma ada 869 yang diterima secara keseluruhan," ujarnya.

Diungkapkan pula bahwa salah satu klasifikasi la-

## SINAU SEJARAH KEISTIMEWAAN DIY Kepindahan Ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta

YOGYA (KR) - Kepindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta, 4 Januari 1946 hingga 29 Desember 1949 merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting bagi tegaknya NKRI.

Menurut Sejarahwan UGM Julianto Ibrahim MHum, ada beberapa hal yang menyebabkan Yogyakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia. Salah satunya adalah waktu itu Jakarta dinilai tidak aman.

Sejak September 1945, lanjut Julianto, sekutu mulai masuk ke Indonesia dan menguasai Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya serta beberapa kota besar lainnya. "Nah, pada saat di Jakarta, sekutu waktu itu dibonceng oleh Nica atau Belanda kemudian menyebabkan Jakarta menjadi tidak aman," katanya.

Situasi tersebut kemudian mendorong Sukarno untuk mengadakan rapat di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta pada 1 Januari 1946, bersama seluruh kabinet membicarakan langkah-langkah berikutnya. "Dalam rapat itu diputuskan bahwa Yogyakarta dipilih menjadi daerah pengganti Jakarta untuk ibukota," jelas Julianto.

Setelah keputusan itu, maka Sukarno memerintahkan kepada jawatan kereta api untuk menyediakan kereta api. "Ada dua kereta api yang disediakan dan kereta api itu disimpan di Stasiun Manggarai, yaitu kereta api luar biasa IL7 dan IL8," katanya.

Dua kereta api yang salah satunya digunakan oleh



KR-Wawan Isnawan  
Julianto Ibrahim MHum

Sukarno adalah kereta api luar biasa IL8 dengan masinis Husein, juru api Murtadi dan Suad. Pada pukul 17.30 kereta api itu langsir dari Stasiun Manggarai ke belakang rumah Sukarno.

Pada 3 Januari, kata Julianto, anggota kabinet sudah berkumpul sejak pukul 17.30 di rumah Sukarno. Kemudian tepat pukul 18.00, seluruh kabinet beserta keluarga berangkat menuju Yogyakarta dan sampai di Yogyakarta pukul 09.00 pagi.

"Agar tidak diketahui oleh Belanda dan sekutu pada saat itu, mulai dari belakang rumah Sukarno sampai Bekasi, lampu kereta api dimatikan. Baru setelah Bekasi ke timur, lampu kereta api dihidupkan," katanya.

Perpindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta mendapat dukungan dari Sultan HB IX. "Kita tahu bahwa pada saat itu Sultan satu-satunya yang menunjukkan dukungan

luar biasa kepada republik. Sebagai jaminan dari Yogyakarta akan memberi perlindungan kepada mereka," katanya.

Selain itu, kata Julianto, kita juga tahu bahwa sejak 19 Agustus 1945, Sultan sudah mengirim telegram ke Jakarta untuk pernyataan dukungan dan ucapan selamat kepada Sukarno dan Hatta yang kemudian dilanjutkan dengan Amanat 5 September.

Sejarah Yogyakarta pernah menjadi ibukota RI penting diperingati. Karena itu Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY menggelar acara bertajuk Sinau Sejarah Keistimewaan DIY 'Yogya Ibukota RI', Rabu (8/1), pukul 13.00 - 16.00 di SMA Negeri 2 Wates, Jalan KH Wahid Hasyim No 19, Kabupaten Kulon Progo, dan disiarkan live streaming melalui channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Seperti diketahui, selama RI berdiri, Yogyakarta tercatat sebagai satu-satunya wilayah yang dijadikan sebagai ibukota selain Jakarta. Bahkan pada saat Agresi Militer Belanda II, Yogyakarta meskipun sempat diduduki oleh Belanda, tapi ibukota RI tetap di Yogyakarta.

Sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan senantiasa harus diinformasikan terus menerus kepada generasi muda. Berbagai peristiwa sejarah revolusi yang terjadi di Yogyakarta mesti dipahami, dihayati, dan dimaknai oleh para penerusnya. (Wan)

poran yang disampaikan ke lembaga tersebut terkait dengan perilaku jaksa dalam persidangan atau dalam menangani kasus.

Terhadap laporan-laporan tersebut, pihaknya menindaklanjutinya melalui mekanisme penyelesaian masalah. Setelah mekanisme dijalankan, hasil yang berupa

rekomendasi akan diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).

"Setelah satu tahun, biasanya kami infokan semuanya, baru nanti kami laporkan kepada Presiden," ujarnya. (Ant/San)-d

## JAGA KEAMANAN DATA NASABAH BRI Tegaskan Pentingnya Masyarakat Hindari Instalasi APK Ilegal

JAKARTA (KR) - Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman siber yang sering kali dimulai dari pemasangan aplikasi dari sumber yang tidak resmi. Pemasangan file APK (Android Package) dari luar Play Store resmi dapat membuka celah bagi serangan malware. Dalam beberapa kasus, perangkat yang terinfeksi malware ini berisiko mengalami pencurian data pribadi, termasuk informasi akun perbankan, yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan berujung kepada kehilangan dana yang disimpan di perbankan.

Direktur Digital & Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha, menyarankan masyarakat agar selalu mengunduh aplikasi dari situs terpercaya. "Keamanan digital menjadi prioritas utama bagi BRI. Kami menyadari bahwa ancaman siber terus berkembang, dan kami selalu berkomitmen untuk terus menjaga data nasabah dengan standar tertinggi. Oleh karena itu, kami menghimbau agar masyarakat selalu mengunduh aplikasi hanya dari sumber resmi seperti Google Play Store, terutama untuk aplikasi yang terkait dengan layanan perbankan. Hal ini merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk melindungi perangkat dan data pribadi dari ancaman yang semakin kompleks," ujarnya.

BRI juga menegaskan pentingnya melakukan verifikasi terhadap izin aplikasi sebelum mengunduh atau memasang aplikasi, serta rutin memperbarui aplikasi mobile banking untuk menjaga keamanan nasabah. Selain itu, BRI mendorong para pengguna untuk mengaktifkan fitur Play Protect yang disediakan oleh Google untuk mendeteksi dan mencegah aplikasi berbahaya yang dapat merusak perangkat.



KR - Istimewa  
Jaga keamanan data nasabah, BRI tegaskan pentingnya masyarakat hindari instalasi APK ilegal

### Modus Penipuan Siber yang Perlu Diwaspadai

- Penyamaran oleh Penjahat Siber: Pelaku kejahatan digital seringkali berpura-pura menjadi perwakilan lembaga atau perusahaan terpercaya untuk mengelabui korban.
- Pengunduhan Aplikasi Palsu: Korban diarahkan untuk mengunduh file APK yang tampaknya berasal dari sumber terpercaya, namun sebenarnya adalah aplikasi berbahaya. Aplikasi palsu ini seringkali juga memperdaya nasabah untuk mengubah konfigurasi ponsel agar menjadi kurang aman atau meminta izin (permissions) yang berlebihan dan sebetulnya tidak diperlukan.
- Pengaturan Keamanan yang Dimodifikasi: Korban dipandu untuk menonaktifkan fitur keamanan seperti Play Protect atau mengaktifkan opsi instalasi dari sumber yang tidak dikenal, yang membuka potensi celah keamanan.
- Akses ke Data Pribadi: Setelah aplikasi berbahaya terpasang,

instal, penjahat siber dapat mengakses dan mencuri data pribadi korban, termasuk informasi perbankan.

### Langkah-langkah Pencegahan yang Dapat Dilakukan

- Unduh aplikasi hanya dari sumber resmi seperti Google Play Store untuk memastikan keamanan aplikasi yang diinstall.
- Aktifkan fitur Play Protect pada perangkat Android untuk memindai dan memblokir aplikasi berbahaya secara otomatis.
- Nonaktifkan opsi instalasi dari sumber tidak dikenal pada pengaturan perangkat untuk mencegah penginstalan aplikasi dari luar toko aplikasi resmi.
- Pastikan fitur Accessibility Services (Layanan Aksesibilitas) dinonaktifkan di pengaturan Android untuk mencegah penyalahgunaan.
- Periksa izin (permissions) aplikasi dengan teliti, terutama yang berhubungan dengan data sensitif dan fitur perangkat.

- Selalu perbarui aplikasi mobile banking ke versi terbaru untuk mendapatkan perlindungan tambahan dari potensi celah keamanan.

### Tindakan Darurat Jika Terindikasi Terkena APK Berbahaya:

- Se segera nonaktifkan akses ke aplikasi mobile banking atau layanan keuangan pada perangkat Anda.
- Hubungi Call Center BRI di 1500-017 untuk mendapatkan bantuan segera.
- Lakukan "Factory Reset" untuk mengembalikan perangkat ke kondisi aman dan meminimalkan kerusakan lebih lanjut.

"BRI mengajak seluruh masyarakat untuk lebih waspada dan proaktif dalam menjaga keamanan digital mereka. Dengan memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan yang tepat, masyarakat dapat mengurangi risiko dan melindungi diri dari ancaman siber yang semakin kompleks," ujar Arga. (\*)



KR - Istimewa  
Direktur Digital & Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha



KR - Istimewa  
Ilustrasi aktivitas teller dan nasabah di kantor cabang BRI



KR - Istimewa  
Jaga keamanan tabungan, BRI ajak nasabah ubah data pribadi secara berkala